#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan ini merujuk pada beberapa penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan:

## 2.1.1 Penelitian oleh Marihot dan Doddy (2007)

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh-pengaruh pelaksanaan corporate governance terhadap tindakan manajemen laba yang terjadi diperusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan variabel dependen manajemen laba, dan menggunakan variabel independen corporate governance yang diproksikan dengan komposisis dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit. Dalam penelitian in penulis mengambil 20 sampel perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta periode 2000-2004. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan cara purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan criteria yang ditentukan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap terjadinya manajemen laba di perusahaan perbankan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap terjadinya manajemen laba perusahaan perbankan, keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap

manajemen laba perusahaan perbankan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama berupaya untuk meneliti pengharuh pelaksanaan *corporate governance* terhadap manajemen laba, sama-sama menggunakan analisis deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan juga hipotesis menggunakan regresi berganda. Serta pengambilan sampel yang sama yaitu perusahaan perbankan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kriteria pemilihan sampel perusahaan, dan juga proksi dari *corporate governance*.

#### 2.1.2 Penelitian oleh Hikmah (2013)

Penelitian ini menggunakan ukuran dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial, dan manajemen laba sebagai variabel dependen. Menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan menggunakan alat uji asumsi klasik dan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *good corporate governance* secara simultan berpengaruh terhadap manajamen laba. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan kepemilikan manjerial berpengaruh terhadap manajemen laba.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang manajemen laba pada perusahaan perbankan, menggunakan metode analisis deskriptif dan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi berganda. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada pemilihan tahun buku perusahaan perbankan yang akan diteliti pada penelitian sebelumnya menggunakan tahun buku 2009-2011 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahun buku 2007-2011.

#### 2.1.3 Penelitian oleh Dwi Metta Karuniasih (2013)

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Variabel independen *good corporate governance* diukur dengan menggunakan kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan *top share*, sedangkan manajemen laba sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan *top share* berpengaruh terhadap manajemen laba.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengambil sampel di perusahaan perbankan, meneliti tentang manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan, menggunakan metode analisis deskriptif dan uji asumsi klasik. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada pemilihan variabel yang di mana di dalam penelitian sebelumnya menggunakan *Top Share* untuk mengukur *good corporate governance* sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan *Top Share*.

Dibawah ini merupakan tabel dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan menjadi acuan dalam penulisan penelitian sekarang.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2007)	Variabel dependen:  a. Manajemen laba Variabel independen:  a. Komposisi dewan komisaris independen, b. Ukuran dewan komisaris independen, c. Keberadaan komite audit, d. Ukuran perusahaan.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel komposisis dewan komisarisn berepengaruh negative secara signifikan terhadap terjadinya manajemen laba di perusahaan perbankan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap terjadinya manajemen laba perusahaan perbankan, keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba perusahaan perbankan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2.	Penelitian Hikmah Is'ada Rahmawah (2013)	Variabel dependen:  a. Manajemen laba Variabel independen: Good corporate governance  a. Dewan komisaris independen, b. Komite audit independen, c. Kepemilikan manajerial.	Hasil dari penenlitian ini menunjukkan bahwa mekanisme good corporate governance secara simultan berpengaruh terhadap manajamen laba. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan kepemilikan manjerial berpengaruh terhadap manajemen laba.
3.	Penelitian Dwi Metta Karuniasih (2013)	Variabel dependen:  a. Manajemen laba Variabel independen: Good corporate governance  a. Kepemilikan manajerial, b. Proporsi dewan komisaris independen, c. Komite audit, d. Top Share	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan Top Share berpengaruh terhadap manajemen laba.

Sumber : Jurnal

## 2.2 <u>Landasan Teori</u>

#### 2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi pada awalnya berkaitan dengan maslah kepemilikan perusahaan melalui pembelian saham (Jensen & Meckling, 1976) dalam Moeljadi (2006). Pada perkembangannya teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua pihak yang bersifat kontraktual (Einsendhardt, 1998) dalam Moeljadi (2006).. Penggunaan geori agensi ini berada dalam dua sisi yang berbeda sehingga masih menjadi perdebatan.

Teori agensi berkembang dalam dua aliran, positivism dan principal agent (Jensen, 1983) dalam Moeljadi (2006). Keduannya menggunakan kontak yang sama, yaitu adanya kontrak prinsipil dan agen. Positivism difokuskan pada situasi yang menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara agen prinsipil dan cara pengelolaan konflik tersebut agar perilaku agen lebih terkendali pada kepentingasn prinsipil. Secara umum, pendapat itu hanya berfokus pada hubungan agen prinsipil atau antara pemilik dengan manajer perusahaan yang go public dan pendekatannya tidak terlalu matematis (Berle & Means, 1932) dalam Moeljadi (2006). Fama & Jensen (1983) dalam Moeljadi (2006) menggambarkan peran dewan direksi yang dapat dimanfaatkan pemilik untukn memonitor perilaku oportunitis manajer.

Adanya konflik kepentingan dalam kepemilikan dapat menimbulkan biaya agensi, yakni biaya yang dikeluarkan agar pihak yang diberi wewenang dapat bertindak sesuai keinginan pemilik (Bwzooyen, 2002) dalam Moeljadi (2006). Biaya-biaya agensi misalnya sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk melakukan pengawasan (monitoring cost), biaya yang dikeluarkan oleh pihak pemilik untuk mencegah agar tindakan manajer tetap sesuai dengan kepentingannya.
- 2. Biaya yang dikeluarkan untuk menjamin agar manajer tidak mengambil keuntungan dan fasilitas yang diberikan (*boanding cost*),
- 3. Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk mengembalikan citra perusahaan dan kesan yang buruk karena tidak tercapainya dua tujuan tersebut.

Konflik kepentingan selalu muncul kalau dua pihak mempunyai kepentingan yang berbeda (Irving, 2003) dalam Moeljadi (2006). Perbedaan kepentingan tersebut harus dikurangi agar biaya yang dikeluarkan akibat pengelolaan konflik lebih rendah. Dengan demikian, akan diperoleh keuntungan sebagai berikut:

- Dapat menjamin kepada pemberi tugas untuk mendapatkan manfaat yang besar bagi organisasinya,
- 2. Dapat lebih mengonsentrasikan langkahnya pada program-program yang lebih konkret,
- 3. Dapat menaikkan nilai perusahaan secara total.

Konflik agensi tersebut harus diminimalkan dengan berbagai langkah strategis, tujuannya agar nilai perusahaan menjadi lebih tinggi. Nilai perusahaan yang sangat tinggi sangat diinginkan oleh keduanya, yakni pemilik dan manajer.

## 2.2.2 Manajamen Laba (Earnings Management)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Hikmah (2013) menyebutkan bahwa manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) atau yang disebut dengan *agency conflict*. Sebagai *agen* manajer, secara moral bertanggung jawab untuk menoptimalkan keuntungan para pemilik, namun disisi lain manajer juga memiliki kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar *agen* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*.

Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda seperti antara manajer yang juga sekaligus sebgai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dalam hal ini akan mempengaruhi pemanipulasian laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan pada metode akuntansi yang diterpakan perusahaan yang mereka kelola. Sehingga manajer yang memiliki kepemilikan saham cenderung melakukan tindakan manajemen laba (Boediono, 2005).

## 2.2.3 Faktor –faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Menurut Scott dalam Wedari (2004) motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba adalah:

# 1. *Bonus Purposes* (rencana bonus)

Merupakan motivasi manajer yang bekerja di perusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang diterimanya.

## 2. *Political Motivations* (motivasi politik)

Motivasi dari perusahaan-perusahaan besar dan industri strategis yang cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.

#### 3. *Debt covenant* (kontrak hutang jangka panjang)

Motivasi yang sejalan dengan hipotesis *debt covenant* dalam teori akuntansi positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat "memindahkan" laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.

# 4. *Taxation Motivation* (motivasi perpajakan)

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

# 5. Penggantian CEO (*Chief Executive Officer*)

CEO yang akan habis masa penugasannya atau pensiun akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian pula dengan CEO yang kinerjanya kurang baik, dia akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.

## 6. *Initial Public Offering* (penawaran saham perdana)

Pada saat perusahaan go public, informasi keuangan yang ada dalam laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk mempengaruhi keputusan calon investor maka manajer berusaha menaikkan laba yang akan dilaporkan.

#### 2.2.4 Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Menurut Scott (2001) dalam Desi (2011) disebutkan ada beberapa bentuk rekayasa yang sering dilakukan oleh pihak manajemen agar laba yang dilaporkan pada laporan keuangan sesuai dengan yang diinginkan, yakni:

#### 1. Taking a Bath

Taking a bath sering disebut juga big baths, visa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya saja adanya pergantian direksi. Bila teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode yang sedang berjalan. Metode ini dilakukan bila kondisi yang tidak menguntungkan ridak dapat dihindari lagi. Sehingga mengakibatkan laba pada periode yang akan

datang akan tetap tinggi meskipun kondisi perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

#### 2. Income Minimization

Metode ini hampir sama dengan metode *taking a bath* namun tidak dilakukan dengan ekstrim. Metode ini dilakukan pada saat profitabilitas suatu perusahaan sangat tinggi, hal ini dilakukan dengan maksud mengurangi kemungkinan munculnya biaya policy. Kebijakn yang timbul dari metode ini adalah dapat berupa penghapusan barang modal dan aktiva tidak berwujud, beban pengeluaean iklan, serta beban biaya riset.

#### 3. *Income Maximation*

Metode ini bertujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Selain itu metode ini juga dapat dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap kontrak hutang jangka panjang.

#### 4. *Income Smoothing*

Metode ini cenderung lebih dipilih oleh perusahaan untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil dibandingkan dari perudahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis. Metode perataan laba ini dapat dicapai dengan ketentuan laba yang tinggi untuk hitang dan bertentangan dengan nilai asset pada tahun yang baik, sehingga ketentuan ini dapat dikurangi dan metode ini dapat mempengaruhi laba perusahaan yang dilaporkan pada periode laba

## 5. Timing Revenue and Expense Recognition

Metode ini dilakukan dengan cara membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi. Misalnya pengakuan atas prematur pendapatan.

#### 2.2.5 Corporate Governance

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan kepada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainnya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan dapat menguntungkan banyak pihak yang memakai laporan keuangan tersebut (Marihot dan Doddy, 2007).

Komite Nasional Kebijakan Governance atau KKNG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok GCG harus diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan.

Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:

# 1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh setiap pemangku kepentingan. Perusahaan harus

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan peamngku kepentingan lainnya.

# 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan peamngku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untukl mencapai kinerja yang berkesinambungan.

# 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizien*.

#### 4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

## 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

## 2.2.6 Mekanisme Corporate Governance

Terdapat dua jenis mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan antara kepentingan manajer dan pemegang saham (*stakeholder*) yaitu mekanisme pengendalian perusahaan internal dan mekanisme pengendalian berdasarkan pasar. Mekanisme pengendalian internal disesain untuk menyamakan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Prinsip-prinsip internasional mengenai *corporate governance* menurut FCGI (2001) antara lain mencakup:

- 1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the right of stakeholders*)

  Hak-hak para pemegang saham yang harus diberikan informasi secara benar dan tepat pada waktunya dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan serta turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- 2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (the equitable treatment of stakeholders)

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham terutama terhadap pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting.

3. Peranan stakeholder yang terkait dengan perusahaan (the roles of stakeholder)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antar perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek laporan keuangan.

4. Keterbukaan dan Transparansi (disclosure and transparency)

Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan.

5. Akuntabilitas dewan komisaris (*the responsibility of the board*)

Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada pemegang saham perusahaan.

#### 2.2.7 Komisaris Independen

Dewan komisaris dibagi menjadi yaitu executive directors dan non-executive director, dewan komisaris independen masuk kedalam non-executive director atau yang berasal dari luar perusahaan. Dewan komisaris harus benar-benar yakin dalam memilih anggotanya. Anggota dewan komisaris harus memiliki pengetahuan yang luas agar dapat dengan cermat dalam pengambilan keputusan, anggota dewan komisaris independen harus memiliki *judgment* yang baik dan juga harus memiliki pengalaman yang banyak dan sesuai dengan bidang yang dikerjakan. Fungsi komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai

penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas atau yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengukurannya menggunakan prosentase jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan (Dwi,2013).

Dewan komisaris menurut peraturan Bapepam-Lembaga Keuangan telah mengeluarkan peraturan No.IX.1.6 mengenai direksi dan Komisaris Emiten Perusahaan Publik. Peraturan tersebut merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 Tanggal 29 November 2004, yang berlaku untuk komisaris (termasuk direksi), yang menyatakan sebagai berikut (Arief Effendi, 2009:17):

- Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau pengungkapan fakta yang tidak material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan keadaan emiten atau perusahaan public yang terjadi pada saat pernyataan itu dibuat.
- Komisaris bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng terhadap kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

3. Komisaris tidak dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud peraturan tersebut, apabila komisaris yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.

Pada prinsipnya komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada para direksi jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, maka seorang dewan komisaris dapat meminta bantuan pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya (menurut KNGCG).

Dalam kaitannya dengan implementasi GCG di perusahaan, diharapkan bahwa keberadaan komisaris maupun komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap pada perusahaan. Maka dari itu, peranan komisaris indpenden sangatlah penting. Namun dalam kenyataan yang ada selama ini di Indonesia terdapat kevcenderungan bahwa komisaris sering kali melakukan intervensi terhadap direksi dalam menjalankan tugasnya. Sementara disisi lain kedudukan direksi biasanya sangat kuat bahkan ada beberapa direksi yang enggan membagi wewenang serta tidak memberikan informasi yang memedai kepada komisaris.

## 2.2.8 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial digunakan sebagai upaya untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik (Boediono, 2005). Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen sendiri secara pribadi. Kepemilikan manajerial yang lebih besar menunjukkan bahwa kepentingan pihak manajerialnya lebih besar dibandingkan dengan kepentingan para *stakeholders*. Dengan adanya kepemilikan manajerial yang lebih banyak dibanding dengan kepemilikan para *stakeholders* maka diharapkan para manajer yang memiliki saham di perusahaan dapat mengikuti dan bertindak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para *stakeholders*. Kepemilikan manajerial dalam hal ini akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntasi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.

## 2.2.9 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menedefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian tugasnya adalah memebantu dan memperkuat fungsiu dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Komite audit perbankan dapat dipandangn sebagai wujud mekanisme pengendalian yang diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan. Tetapi dalam pengamatan pengamat ekonomi atau perbankan, pada praktiknya, sebagian besar komite audit perbankan tidak berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bank yang dilikuidasi karena pailit sehingga usahanya terpaksa harus dibekukan. Misalnya saja pada saat awal krisis moneter pada tahun 1997-1999, banyak sekali bank yang masuk dalam kategori Bank Beku Operasi (BBO), serta bank dalam likuidasi. Hal ini memmbukyikan bahwa aspek di perusahaan perbankan sangatlah lemah (Arief Effendi, 2009:29).

Sesuai dengan Kep.29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit adalah merupakan komponen baru dalam system pengendalian perusahan. Berdasarkan Surat Edaran dari BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, yang didalamnya disebutkan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya tiga orang anggota termasuk dengan ketua komite audit. komite audit juga berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal perusahaan.

Sesuai dengan Kep.29/PM/2004 menuliskan tugas dari komite audit :

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
- Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya, yang berhubungan.

- 3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh nauditor internal.
- 4. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksaan manajemen risiko oleh direksi
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas berkaitan dengan emitmen,
- 6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan perusahaan.

#### 2.2.10 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya (Wien, 2010). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen laba. Presentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat dapat memepengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai pihak manajemen (Boediono, 2005).

Kepemilikan institusional diharapkan mampu untuk mengatasi masalah keagenan yang timbul antara pihak *principal* dan *agen*. Melalui kepemilikan institusional ini efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaaan oleh pihak

manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar dari pengumuman laba perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen (*agen*) melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen (Rizki,2009). Prosentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan (Boediono,2005)

# 2.2.11 Pengaruh proporsi Komisaris Independependen terhadap Manajemen Laba

Farma dan Jensen (1983) dalam Ujiyantjo dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat bertindak sebagai pengaharuh dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Beasley (1996) dalam Isnanta (2008) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektifitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian juga melaporkan bahwa komposisi dewan komisaris lebih untuk mengurangi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, daripada kehadiran komite audit. Analisis lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik komisaris yang berasal dari luar perusahaan keuangan.

Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase dewan komisaris independen tidak berkolerasi secara signifikan terhadap akrual kelolaan, meskipun begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan dewan komisaris independen menunjukkan koefisien positif yang signifikan terhadap return.

#### 2.2.12 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana dan Herawaty, 2005). Investor instutional dan manajemen memiliki insentif kuat untuk mendapatkan informasi prapengungkapan (*predisclosure information*) mengenai perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab fidusiarinya serta untuk mendapatkan kinerja portofolio mereka (Darmawati, 2003).

Dalam pemisahan antara kepemilikan saham dan pengendalian atas *public* perusahaan menciptakan konflik kepentingan antara manajer dan *stakeholder*. Kepemilikan manajerial yang lebih besar menunjukkan kepentingan antara manajerial yang lebih besar dari kepentingan *stakeholder*. Konflik muncul ketika manajer memilki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraannnya. Kepemilikan manajerial yang lebih besar menguntungkan pemegang saham karena meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi ketika kepemilikan manajerial menjadi lebih besar maka manajer mampu untuk mensejahterakan manajer itu sendiri (Boediono, 2005).

## 2.2.13 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Wedari (2004) menguji pengaruh interaksi antara dewan komisaris dan komite audit terhadap praktik manajemen laba. Dengan menggunakan sampel perusahaan *non financial* yang listing di BEJ untuk tahun 1994 hingga 2002, Wedari menunjukkan interaksi dewan komisaris dengan komite audit justru berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Penelitian Veronica dan Utama (2005) menguji pengaruh keberadaan komite audit dalam perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut melaporkan bahwa variabel keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan, artinya keberadaan komite audit tidak mampu untuk mengurangi manajemen laba.

#### 2.2.14 Pengaruh Kepemilikan Institutional Terhadap Manajemen Laba

Dengan adanya investor institusional diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya manajemen laba, dindingkan dengan investor manajerial. Investor institusional diharapkan lebih mampu memonitor investasinya yang ada pada perusahaan, larena mereka memiliki tingkat pengawasan yang lebih tinggi dan lebih protek untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba pada perusahaan tersebut. Dimana semakin besar prosentase saham yang dimiliki oleh pihak institusional maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya manajemen laba (Desi, 2011).

Tindakan pengawasan perusahaaan oleh pihak institusional dapat mendorong pihak manajemen untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap

kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri dengan demikian akan mengurangi tingkat resiko terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemn (Rizki, 2009)

# 2.3 Kerangka Pemikiran

Tata kelola perusahaan (corporate governance) dapat membatasi perilaku para manajer yang berbuat curang terhadap para stakeholders. Adanya corporate governance diharapkan dapat menciptakan suatu perusahaan yang dikelola dengan baik dan terbuka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip corporate governance diharapkan perusahaan dapat mencapai good corporate governance sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yaitu: terbuka, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

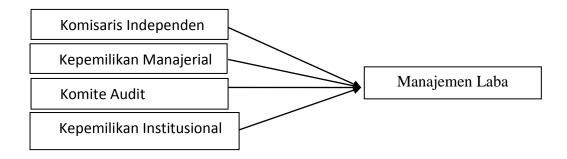
Earning management atau manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba perusahaan. Sehingga muncul istilah manajemen laba sebagai akibat dari pemanipulasian laba yang dilakukan oleh para manajer untuk kepentingan pribadinya dan juga untuk kepentingan perusahaan. Dengan earnings management para manajer dapat mengelabuhi para pengguna laporan keuangan perusahaan.

Penerapan *corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit diharapkan mampu mengurangi tindakan manajemen laba tersebut, sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah mekanisme *corporate* governance berpengaruh terhadap manajemen laba dan dapat mengurangi

tindakan dari manajemen laba itu sendiri. Dari pengertian diatas ini maka kerangka pemikiran teoritis yang di ajukan adalah :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Mekanisme Corporate Governance



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba telah terlaksana dengan baik atau belum. Kualitas tata kelola perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit, sedangkan manajmen laba diukur dengan menggunakan Discretionarry accruals.

#### 2.4 <u>Hipotesis Penelitian</u>

Hipotesis penelitian adalah praduga sementara dari jawaban suatu masalah yang akan diteliti. Dalam hipotesis ini peneliti harus menguji pembuktian yang bersifat fakta. Penelitian *corporate governance* dapat mengurangi tindakan pemanipulaisan laba perusahaan. Berdasarkan kerangka pikir yang sudah

dijelaskan di atas, maka penulis menyususn hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : komisaris independen berpengaruh terhadap praktik manajemen laba,

H<sub>2</sub> : kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik manajemen laba,

H<sub>3</sub> : keberadaan komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

 $H_4$  : kepemilikan institutional berpengaruh terhadap terjadinya manajemen laba.